

Analisis tren penelitian kualitatif korupsi di bidang ekonomi menggunakan *content* analisis Nvivo

Muh.Andri Syafaat Hamsari, Hendi Yogi Prabowo

Universitas Islam Indonesia
E-mail: andrisyafaat11@gmail.com

Abstrak

Rencana penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini untuk menganalisis tren penelitian kualitatif tentang korupsi di jurnal bidang ekonomi di data base Sinta pada tahun 2010-2019. Kegiatan ini dimaksudkan melibat gambaran umum korupsi di Indonesia serta untuk mengevaluasi hasil-hasil riset penelitian korupsi di Indonesia melalui karya tulis yang dihasilkan dan dimuat di jurnal pada data base sinta. Permasalahan umum dalam penelitian ini yaitu hasil dari artikel yang ditulis para peneliti sangat menarik dan beragam untuk di teliti kembali dikarenakan perbedaan perspektif ataupun asumsi yang di landasi oleh sudut pandang yang memiliki kecenderungan secara objektif, sistematis, dan generalis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis data sekunder. Teknik analisis data penelitian yang digunakan untuk mengelola, mengintegrasikan, mencari pola dan hubungan yang lebih rinci seperti menggunakan Query, Framework matrices, Cluster analysis, Chart dengan bantuan dari software NVivo 11.

Kata Kunci: Korupsi, Penelitian, Sinta, Nvivo

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art22](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art22)

PENDAHULUAN

Indonesia yang notabeneanya sebagai negara berkembang masih menyisakan beberapa polemik mendasar yang menghambat kemajuan bangsa ini. Sejak berdirinya bangsa ini polemik yang terjadi di era orde lama hingga orde reformasi saat ini masih selalu ada, salah satu dari polemik tersebut yang sangat mendasar bagi bangsa ini adalah korupsi. Korupsi yang terjadi di bangsa ini tergolong sebagai momok paling besar yang secara nyata menghantui hingga memunculkan persepsi negatif dikalangan masyarakat. Persepsi negatif yang ada dikalangan masyarakat saat ini muncul akibat maraknya pemberitaan kasus tindak pidana korupsi yang tak henti-hentinya menjadi sorotan diberbagai media massa. Hal itu disebabkan karena *massive* nya korupsi di Indonesia, korupsi tidak hanya terjadi di sektor lembaga pemerintah saja, melainkan di sektor lembaga swasta juga banyak terjadi (Hamdani et al. 2017).

Publik tentu masih mengingat kejadian mega skandal korupsi yang pernah terjadi di negara ini dengan nilai fantastis yang diyakin merugikan negara begitu besar serta kasusnya tak kunjung selesai bahkan masih diyakini adanya keterlibatan pihak lain yang masih berkeliaran di luar sana, sebut saja skandal kasus BLBI, skandal kasus Soeharto, skandal Bank Century, skandal proyek Hambalang dan skandal korupsi E-KTP (Publika, 2019). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyelesaikan masalah ini, baik melakukan secara preventif maupun secara refresif, namun sampai dengan order reformasi kini masih banyak orang yang melakukan korupsi sehingga belum memberikan hasil yang maksimal (Arif, 2015).

Meskipun KPK lembaga yang merupakan garda utama dalam penanganan korupsi dan dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi penanggulangan kejahatan korupsi harus melibatkan berbagai pihak agar pencegahan pemberantasan korupsi di negara ini bisa efektif sebagai mana yang sering dikemukakan oleh pimpinan-pimpinan KPK. Hal ini bisa liat dari data yang di dikeluarkan oleh *Anti Corruption Clearing House* yang merupakan wadah *online* yang berisi data dan informasi publik mengenai anti korupsi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana pada data yang dikeluarkan oleh ACCH, (2018) menampilkan penanganan tindak pidana korupsi pada tahun 2004-2018 yang dilakukan oleh KPK

berjumlah 3.929 dengan rincian: penyelidikan 1.135 perkara, penyidikan 887 perkara, penuntutan 719 perkara, inkracht 578 perkara dan eksekusi 610 perkara.

Memang tidak mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini apalagi korupsi telah menyebar dan meluas ke berbagai organisasi maupun lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Ini merupakan tantangan yang tak mudah dan butuh kerja keras bagi pemimpin tertinggi yang terpilih di negara ini. Bahkan dari beberapa pemimpin yang terpilih sebelumnya, dalam hal ini presiden selalu menyisakan pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai dengan banyaknya pelanggaran tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di negara ini. Hal tersebut dikarenakan kejahatan korupsi akan selalu muncul dengan modus dan cara yang cukup sulit untuk dideteksi atau ditanggulangi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi, yang mana kemajuan teknologi juga dimanfaatkan para pelaku guna melakukan kejahatannya. Apalagi dengan pengucuran anggaran yang begitu besar dan sejalan dengan intensitas pembangunan sebuah negara, akan memunculkan perilaku korupsi bagi beberapa orang yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan begitu, variatif perilaku atau peristiwa korupsi yang terjadi, memunculkan ketertarikan para peneliti dalam mempelajari aspek perkembangan hingga memunculkan gagasan ataupun pola pikir yang berbeda antara peneliti yang mana akan membantu KPK dalam pemberantas praktik licik-kotor para koruptor.

Untungnya dengan era keterbukaan saat ini, publikasi tentang korupsi semakin mendapat ruang pemberitaan baik melalui media elektronik, surat kabar bahkan melalui pemberitaan di internet. Hal ini memiliki dampak positif bagi semua pihak, dikarenakan masyarakat secara langsung ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penanganan korupsi. Namun berhasil tidaknya penanganan korupsi sangatlah tergantung pada komitmen dan kemauan politik (*political will*) segenap aparat penegak hukum yang bertanggungjawab menanganinya (Astuti, 2014). Para peneliti diharapkan memiliki andil besar dalam pengkajian dan mendiseminasikan pengetahuan anti korupsi secara berkelanjutan dan teratur. Berbagai lembaga negara di Indonesia dituntut untuk berkorelasi dalam menanggulangi korupsi yang telah menjamur di berbagai lini lembaga negara. Dalam hal ini, kemenristekdikti khususnya sebagai lembaga negara yang diyakini dapat mewadahi aspirasi serta solusi yang begitu beragam melalui ide dan gagasan para peneliti melalui karya ilmiah mereka pada portal website *Science And Technology Index* (SINTA), guna menunjang KPK dalam menangani korupsi di Indonesia.

Diantara berbagai macam penelitian terkait korupsi, hasilnya sangat menarik dan beragam untuk diteliti kembali. Hal ini dikarenakan perbedaan perspektif ataupun asumsi yang dilandasi oleh sudut pandang yang memiliki kecenderungan secara objektif, sistematis, dan generalis sehubungan dengan dampak yang akan muncul apabila terjadinya korupsi ataupun indikator yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti pandangan dalam penelitian yang dikemukakan oleh Prabowo (2014) yang mengatakan bahwa dengan melihat sisi perilaku korupsi, dapat memperoleh lebih banyak pemahaman tentang cara potensial pelanggaran. Berpikir sebagai acuan dalam menangani korupsi, ketika pelanggar berpotensi terkena tekanan/motivasi, peluang dan rasionalisasi untuk melakukan korupsi, mereka akan (secara sadar atau tidak sadar) menilai semua manfaat dan biaya yang dirasakan sebelum memutuskan untuk melakukan (atau tidak melakukan) korupsi. Sedangkan korupsi terjadi bukan hanya dari sisi sikap pelaku namun korupsi juga terjadi akibat kelemahan pengawasan internal suatu entitas yang menimbulkan tindak seseorang dalam melakukan korupsi. Disisi lain korupsi juga bisa terjadi dikarenakan adanya tumpang tindih ataupun pelemahan kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pemangku kepentingan.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tokarz dan Bucy (2019) mengenai penelitian konten analisis dengan membandingkan tiga jurnal pada bidang sosial komunikasi. Kemudian peneliti menggunakan jurnal ini sebagai acuan dalam melakukan penelitian karena metode yang digunakan untuk penelitian sama dengan menggunakan mekanisme konten analisis. Atas dasar uraian penjelasan di atas, penelitian ini akan mencoba mengkaji "Tren Perkembangan Penelitian Kualitatif tentang Korupsi di Jurnal Bidang Ekonomi yang Terindex di *Sciences and Technology Index* (SINTA) pada Tahun 2010-2019". Penelitian ini menggunakan hasil penelitian dari artikel tentang korupsi selama periode 10 tahun (dari tahun 2010 sampai dengan 2019) melalui jurnal bidang ekonomi yang berada di portal SINTA serta menggunakan data yang dirilis oleh KPK melalui portal *Anti-Corruption Clearing House*, guna melihat perkembangan korupsi yang ada di negara ini. Lemudian khusus untuk jurnal, peneliti hanya menggunakan artikel tentang korupsi yang melakukan metode kualitatif dan menggunakan jurnal yang

terakreditasi nasional dari kemenristekdikti melalui lembaga yang didirikan yang berada dalam naungannya. Jurnal terakreditasi dipilih sebagai bahan pengamatan karena jurnal tersebut telah melalui seleksi ketat sehingga memiliki kredibilitas dan kualitas yang baik.

TINJAUAN LITERATUR

Fraud Theory

Menurut Garner (2014), memberikan definisi mengenai *fraud*, yaitu tindakan penipuan yang mencakup semua sarana dengan aneka trik yang dapat dirancang manusia demi mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi yang palsu. Tidak ada aturan yang pasti dalam mendefinisikan penipuan, karena tindakan termasuk hal-hal yang mengejutkan, mengandung penipuan dengan cara licik dan cara-cara tidak adil. Batasan *fraud* dalam definisi Garner (2014) semata hanya pada tindakan ketidakjujuran manusia. Sementara, menurut Tuanakotta (2013), *fraud* merupakan perbuatan melanggar hukum. *Fraud* disebut sebagai unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, dan penyalagunaan kepercayaan. perbuatan tersebut di landasi tujuan untuk mengambil keuntungan haram yang bisa berupa uang, barang/harta, jasa, tidak membayar jasa atau memperoleh bisnis barang/ jasa dengan menyuap pejabat. Sedangkan menurut Hall (2011), *fraud* (kecurangan) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian.

Diamond Theory

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh (Wolfe dan Hermanson, 2004). *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh (Cressey, 1953). *Fraud diamond* memberikan perkembangan model dari *fraud triangle* yang mana dalam model ini memberikan penambahan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yakni *capability*. Penelitian ini menggunakan *fraud diamond theory* sebagai dasar teori utama. Secara keseluruhan elemen-elemen dari *fraud diamond theory* antara lain :

1. *Pressure (Tekanan)*
Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seorang melakukan fraud. Adapun faktor yang mendorong seorang melakukan fraud antara lain mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tidak etis. Setiap pelaku penipuan menghadapi beberapa tekanan untuk melakukan perilaku yang tidak etis (Abdullahi dan Mansor, 2015). Tekanan juga dapat berhubungan dengan keuangan, non-keuangan, politik dan sosial apalagi berhubungan dengan pekerjaan.
2. *Opportunity (kesempatan)*
Elemen penting kedua dari kecurangan yang terjadi adalah peluang yang dirasakan. Peluang diciptakan oleh kontrol atau sistem tata kelola yang tidak efektif yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penipuan organisasi. Di bidang akuntansi, ini disebut sebagai kelemahan pengendalian internal. Konsep peluang yang dirasakan menunjukkan bahwa orang akan mengambil keuntungan dari keadaan yang tersedia bagi mereka. Sifat kesempatan yang dirasakan adalah seperti tekanan yang dirasakan dalam arti bahwa kesempatan itu tidak harus nyata juga. Namun, ada peluang dalam persepsi dan keyakinan pelaku. Dalam kebanyakan kasus, semakin rendah risiko tertangkap, semakin besar kemungkinan penipuan akan terjadi (Cressey, 1953).
3. *Rationalization*
Rasionalisasi merupakan pembenaran dari perilaku kecurangan akibat kurangnya integritas pribadi karyawan atau penalaran moral (Rae dan Subramaniam, 2008). Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlihat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi dan Mansor, 2015).
4. *Capability*
Ini adalah situasi yang memiliki sifat atau keterampilan dan kemampuan yang diperlukan bagi orang tersebut untuk melakukan penipuan. Di sinilah penipu mengakui peluang penipuan dan kemampuan untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Posisi, kecerdasan, ego, paksaan, penipuan, dan stres, adalah elemen pendukung kemampuan (Wolfe dan Hermanson, 2004). Menurut Mackevicius dan Giriunas

(2013), tindakan setiap orang yang memiliki motivasi, peluang, dan realisasi dapat melakukan penipuan, karena kurangnya kemampuan untuk melakukannya atau menyembunyikannya. Sedangkan menurut Adebisi dan Gbegi (2015), kemampuan (*capability*) yang di maksud dalam melakukan *fraud*, pelaku harus memiliki sifat-sifat, kemampuan, dan otoritas atau kekuasaan yang tinggi dalam organisasi. Sifat yang dimaksud terdiri dari empat sifat pengamatan dalam melakukan *fraud*, yaitu pertama, memiliki posisi yang berwenang atau memiliki fungsi dalam organisasi; kedua, kemampuan untuk memahami dan mengeksploitasi sistem akuntansi dan kelemahan pengendalian internal; ketiga, keyakinan bahwa ia tidak akan terdeteksi atau jika ia tertangkap, ia akan keluar dengan mudah; dan keempat, kemampuan untuk mengatasi *stress* yang muncul dari diri dan orang lain, baik ketika ia melakukan perbuatan buruk. Oleh sebab itu, Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa dalam mendesain suatu sistem deteksi sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan *fraud*. Dengan demikian, penjelasan di atas menjelaskan bahwa perkembangan teori *fraud diamond* yang mana sebelumnya teori *fraud triangle* dapat dijadikan landasan untuk pencegahan dan mendeteksi kecurangan yang muncul dalam sebuah entitas.

Element *Fraud Triangle*

Teori ini berbeda dari teori sebelumnya, akan tetapi teori ini merupakan turunan dari teori diatas. Teori ini menggambarkan bagaimana pelaku melakukan *fraud*. Elemen *fraud* (kecurangan) melibatkan tiga langkah, yakni:

1. *Theft act* (Tindakan)
Theft act merupakan tindakan *fraud* yang dilakukan, tindakan kecurangan biasanya berupa pencurian. Misalnya, *embezzlement* (penggelapan atau pencurian) dan manipulasi laporan keuangan.
2. *Concealment* (Penyembunyian)
Ketika tindakan kecurangan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku adalah menyembunyikan kecurangan dan hasil kecurangannya. Penyembunyian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memalsukan saldo rekening atau laporan hingga membawanya ke lokasi yang jauh dari tempat terjadinya fraud.
3. *Conversion* (Pengkonservasi)
Tahap konversi merupakan tahap di mana pelaku *fraud* menggunakan atau menghabiskan hasil kecurangannya. Seperti halnya *concealment*, *conversion* pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menggunakan hasil *fraud* tersebut untuk membeli rumah dan tanah.

Jenis *Fraud*

Terdapat bermacam-macam jenis tindakan *fraud* dalam aktivitas bisnis. Jenis – jenis *fraud* menurut Tuanakotta (2010) dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)
Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditur. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non-finansial.
2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)
Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran - pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).
3. Korupsi (*Corruption*)
Korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Korupsi

Menurut Frey dan Black (1934), korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan

untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Secara prespektif hukum pengertian korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian melalui melalui perubahan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Jenis Tindak Korupsi

Alatas (1983) mengemukakan bahwa berdasarkan tipenya korupsi dikelompokkan menjadi tujuh jenis korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi transektif (*transactive corruption*) yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak menerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diutamakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi yang mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi inventif (*inventive corruption*) adalah pemberian atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah antara teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dalam norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka memperkaya diri. dan pihak yang dirugikan dengan terpaksa menjadi terlibat atau terjebak hingga menjadi korban perbuatan korupsi.
6. Korupsi otogenik (*otogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Indonesia Corruption Watch (2000) dalam mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi diantaranya:

1. Faktor Politik
Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.
2. Faktor Hukum
Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.
3. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah

dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.

4. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (1) kurang adanya teladan dari pimpinan, (2) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (3) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (4) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Perkembangan Korupsi di Indonesia

Era Orde Lama

Syuraida (2015) menjelaskan bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama kebanyakan terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan di era Orde Lama, kondisi Indonesia yang masih baru merdeka menyebabkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia masih kurang stabil. Upaya untuk menangani kasus korupsi pada saat itu adalah dengan membentuk badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang pertama bernama Panitia Retooling 17 Aparatur Negara yang disingkat PARAN. Tugas dari PARAN itu sendiri adalah melakukan pendataan kekayaan dan harta yang dimiliki para pejabat negara. Namun PARAN pada akhirnya melakukan suatu tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi yang dikenal dengan Operasi Budi. Jika yang dilakukan PARAN pada dasarnya hanya melakukan pengawasan serta mengumpulkan data kekayaan yang dimiliki para pejabat, dalam Operasi Budi, tindakan penyelewengan yang melanggar Undang-Undang akan dibawa langsung ke Pengadilan. Dalam hal ini, tugas yang dimiliki oleh Operasi Budi lebih berat.

Era Orde Baru

Tindakan korupsi yang terjadi di era Orde Baru kebanyakan disebabkan banyaknya pemegang jabatan dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi di era Orde Baru yang kebanyakan dilakukan karena monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan. Dalam kasus-kasus korupsi di era Orde Baru, tidak hanya kekayaan saja yang dicari oleh para koruptor namun kekuasaan serta jabatan menjadi hal yang sangat dicari (Syuraida, 2015).

Era Reformasi

Setelah berakhirnya era orde baru di era reformasi Indonesia dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah era Reformasi dalam mengatasi korupsi adalah dengan mengeluarkan undang-undang anti korupsi serta membentuk badan-badan anti korupsi. Badan anti korupsi yang dibentuk bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang disingkat (KPKPN). Dibentuknya KPKPN melalui Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 pada tanggal 13 Oktober 1999. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPKPN adalah melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara untuk mencegah terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. KPKPN kurang mendapatkan dukungan dari rakyat karena dianggap kurang mampu dalam menangani korupsi yang sudah meluas di setiap lapisan masyarakat. Akhirnya lama kelamaan badan pemberantasan korupsi ini digabung bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Juni 2004.

Publikasi Jurnal Ilmiah

Menurut Suprayitno (2019) jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat karya tulis ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan tulisan sesuai dengan kaidah -

kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala. Publikasi ilmiah umumnya berbentuk artikel yang mana meliputi laporan penelitian, review literatur, proposal terkait teori yang belum diuji ataupun artikel opini. Artikel yang ditulis dalam jurnal ilmiah biasanya dibuat oleh individu dalam komunitas keilmuan yang mana komunitas ilmunan itu meliputi mahasiswa, guru, dosen, peneliti, professor dan jurnalis.

Secara umum telah diketahui bahwa artikel yang harus ditulis peneliti harus bersifat ilmiah. Dengan kata lain jurnal dapat merepresentasikan spesialisasi bidang pengetahuan tertentu. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri terdapat banyak jurnal akademik yang telah terbit diberbagai sumber, namun pemerintah Indonesia harus mengatur kualitas dan objektifitas sebuah data dalam penelitian. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, membangun sebuah lembaga yang mana lembaga tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang ditugaskan dan memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan atas seluruh publikasi terbitan berkala yang diterbitkan. Sebagai bagian tanggung jawab tersebut, LIPI menerbitkan *International Standar of Serial Number* (ISSN) yang berfungsi sebagai tanda pengenalan unik setiap terbitan berkala yang berlaku global. Gunanya untuk lebih memudahkan dalam identifikasi dan pelacakan.

ISSN diperlukan sebagai pengingat akibat banyaknya penerbitan dibidang penelitian demi menjaga temuan atau pemikiran yang orisinal serta tidak plagiat yang ada pada majalah umum, surat kabar dan karya ilmiah yang namanya hampir sama di negara-negara yang berbeda. Disisi lain, KEMENRISTEKDIKTI juga menyediakan portal yang berfungsi sebagai pengindeks jurnal ilmiah yang mana portal tersebut dikenal dengan sebutan *Science an Technology Index* atau di singkat SINTA. SINTA merupakan portal pusat indeks, sitasi, dan keahlian di Indonesia, yang berupa sebuah sistem informasi penelitian berbasis web yang menawarkan akses cepat, komprehensif, dan mudah ke jurnal yang diterbitkan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi Indonesia dan kutipan artikel jurnal. SINTA dimaksudkan untuk mengukur kinerja para peneliti, institusi, dan jurnal di Indonesia. SINTA memberi informasi tentang tolak ukur lembaga, kolaborasi, analisis tren penelitian dan direktori pakar Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI, 2018). Dalam portal SINTA juga memiliki peran sebagai penilai kinerja jurnal yang mengacu pada standar akreditasi dan sitasi, pada penilaiannya jurnal dikelompokkan berdasarkan nilai akreditasi yang meliputi 6 kategori diantaranya SINTA 1 hingga SINTA 6.

Publikasi jurnal ilmiah juga sangat bermanfaat dan membantu bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini disebabkan publikasi jurnal ilmiah dapat menghasilkan artikel-artikel yang berguna sebagai acuan ataupun sebagai pembandingan seperti dalam penelitian ini terdapat sekumpulan penelitian – penelitian sebelumnya yang dinilai dapat memberikan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Terdapat 10 judul penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu dilakukan dari tahun 2013 sampai 2019. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menyampaikan hasil pengkajian dari 10 penelitian terdahulu diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Syuraida (2015), yang mengangkat judul “Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi” metode pengambilan sampel yang diambil ialah metode kualitatif secara huriistik, kritik, interpretasi dan historiografi dengan menggunakan sampel skunder yang bersumber dari koran dan arsip yang berbeda dan yang berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta menggunakan sampel yang bersumber primer dari sumber surat-surat pribadi laporan korupsi yang ditujukan kepada presiden, undang-undang serta mosi tentang pemberantasan korupsi, serta dokumen-dokumen penting mengenai badan pemberantasan korupsi era Orde Lama. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecilnya gaji yang diperoleh di era Orde Lama menyebabkan banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan, didukung pula dengan keadaan sistem pemerintahan Indonesia yang masih belum stabil. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama banyak disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah, karena kondisi Indonesia yang masih belum stabil karena baru menjadi negara yang merdeka. Pengawasan yang kurang juga menjadi penyebab terjadinya korupsi karena koruptor memiliki kesempatan melakukan monopoli kekuasaan yang dimilikinya. Kemudian di era Orde Baru, korupsi terjadi karena banyaknya monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan.

Penelitian yang dilakukan Frolova dkk. (2017), yang berjudul “*Studie the Social Media on Corruption Issue Trough Content Anahysis*”. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif konten analisis, serta menggunakan sampel dari 5 jejaring sosial diantaranya Vkontake, Facebook, Classmates, Twitter dan *live*

journal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna terbesar jejaring sosial adalah Twitter dan *Live journal*, namun masyarakat yang paling banyak memperbincangkan isu korupsi dalam jejaring sosial yaitu Vkonte dan Classmates. Jejaring sosial masih sangat kurang dimanfaatkan sebagai alat yang memiliki pembentukan propaganda antikorupsi dan didalam jejaring sosial secara teratur muncul data yang tercantum dalam hasil jejak pendapat masyarakat sehubungan dengan sikap akibat korupsi.

Penelitian yang dilakukan Erlando (2019), dengan judul “Studi ekonomi di beberapa kota di Indonesia”. Dalam penelitiannya tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ositifistik dan sampel dokumen atau publikasi yang diterbitkan KPK dan Transparency Indonesia. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan regresi yang menggunakan model Tobit yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor ekonomi seperti pertumbuhan rill, belanja pemerintah dan tingkat pengangguran memiliki kecenderungan dalam menaikkan tingkat korupsi yang diukur melalui indeks persepsi korupsi dan variabel IPM, berkecenderungan memberikan determinasi menurunkan tingkat korupsi. Sedangkan penerimaan pajak daerah bukan merupakan determinan terhadap korupsi.

Penelitian yang dilakukan Rivaldi (2017), dengan judul “Korupsi dalam konstruksi media: analisis wacana kritis pemberitaan korupsi di televisi swasta nasional Tv One dan Kompas Tv” dengan pendekatan kualitatif dalam prespektif analisis wacana kritis Van Dijk dan sampelnya menggunakan pemberitaan korupsi di Tv One dan Kompas Tv. Hasil dari penelitian ini memberikan 3 prespektif. Pertama analisis struktur teks, makro-struktur cenderung menonjolkan topik pada bagian awal pemberitaan sebagai strategi Tv One dan Kompas Tv untuk menimbulkan daya tarik berita. Pada tataran super struktur Tv One dan Kompas Tv menggambarkan kecenderungan pola struktur piramida terbalik pemberitaan yang terdiri dari judul, *lead* (intisari berita) dan tubuh berita. Pada tataran mikro-struktur penggunaan metafora Tv One sangat minim dalam penggunaan metafora. Sementara itu, Kompas Tv cenderung menggunakan metafora pada pemberitaan korupsi seperti uang panas, penggelapan dana, nama besar, tercium, menggelembungkan, turun tangan, bancakan uang haram, dalang dan uang pelicin. Hal ini dilakukan sebagai strategi dalam merekonstruksi peristiwa korupsi sehingga bermakna kias sehingga perlu ditafsirkan masyarakat. Kedua, pada dimensi kognisi sosial diketahui Tv One menggunakan skema person, skema diri, skema peran dan skema peristiwa dalam mengonstruksi wacana berita korupsi. Penggunaan skema tersebut didasarkan pada keutamaan nilai berita. Implikasi nilai berita yang tampak agar pemirsa meyakini bahwa wacana berita tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Kompas Tv diketahui menggunakan skema person, skema diri, skema peran dan skema peristiwa. Ketiga, pada dimensi konteks sosial Tv One dalam mengonstruksi wacana pemberitaan korupsi memberi KPK akses wacana yang lebih besar daripada pihak koruptor berupa akses perencanaan, akses *setting* dan akses mengontrol wacana kepada pemirsa. Hal ini dimaksudkan agar wacana yang disampaikan dapat diterima dengan wajar dan tanpa paksaan oleh pemirsa. Sementara itu, Kompas Tv cenderung memberi KPK dan koruptor dalam mengakses wacana. Hal ini agar wacana yang disampaikan terdapat keseimbangan informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulya dkk. (2016) berjudul “Metafora dalam puisi anti korupsi karya penyair Indonesia” yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan konten analisis dengan sampel buku kumpulan puisi enskilopegila koruptor, memaparkan hasil penelitian bahwa penyair Indonesia sangat membenci perilaku korup yang dilakukan oleh para koruptor. Rasa benci atau tidak suka ini diekspresikan melalui ungkapan-ungkapan metaforis di dalam puisinya. Diantara empat kategori metafora yang digunakan, tuturan metafora yang mendominasi dalam puisi anti korupsi adalah metafora kehewanian dan pengabstrakkan serta kategori metafora mengekspresikan perasaan tidak suka dan kecewa para penyair terhadap tindakan pidana korupsi dengan demikian puisi anti korupsi merupakan ekspresi penyair dalam menggunakan kekecewan, kebencian, keprihatinan sekaligus perlawanan terhadap korupsi.

Penelitian yang dilakukan Prihandini (2013), dengan judul “Pola kasus korupsi di Indonesia tahun 2012” menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penerapan analisis konten dan sampel yang digunakan tiga surat kabar nasional seperti Kompas, Media Indonesia dan Republika serta dua surat kabar daerah yaitu Pikiran Rakyat dan Suara Merdeka. Kemudian hasil penelitian menunjukkan korupsi yang dipublikasikan di koran melibatkan legislatif-birokrat-publik yang didominasi oleh kasus suap, aktor usia muda yang relatif, yang melibatkan perempuan, dan beberapa aktor memiliki ikatan keluarga. Selain itu, berdasarkan 11 kasus korupsi yang menjadi obyek pengamatan dalam penelitian ini, tercatat jumlah

dana APBN yang dikorupsi mencapai Rp. 169 miliar. Kemudian, terdapat kasus pembangunan sarana olah raga Hambalang yang hingga akhir tahun 2012 belum dapat dipastikan jumlah kerugian yang ditanggung negara. Fakta yang sudah terungkap di KPK adalah adanya aliran dana sejumlah Rp. 100 miliar dari pelaku korupsi yang digunakan untuk pemenangan kader partai dalam konvensi pemilihan ketua umum suatu partai politik, dan aliran kepada anggota legislatif serta birokrat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2014) dengan judul “Analisis isi kualitatif pesan moral dalam film berjudul kita versus korupsi”. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik konten analisis serta menggunakan sampel dokumentasi film yang berjudul kita versus korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pesan moral yang tampak dalam film berjudul “Kita Versus Korupsi” adalah moral dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang berupa percaya kepada Tuhan. Moral dalam hubungan manusia dengan manusia lain yang berupa kekeluargaan, kepedulian, tolong-menolong. Moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri yang berupa takut, jujur, sabar, keegoisan, keberanian, kecerdikan, harga diri, bangga, keraguan dan kecewa. Hasil analisis yang diperoleh untuk pesan moral yang tersembunyi dalam film berjudul “Kita Versus Korupsi” adalah moral dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang berupa bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Moral dalam hubungan manusia dengan manusia lain yang berupa kasih sayang, rela berkorban, kekeluargaan, kepedulian, gotong-royong dan tolong menolong. Moral dalam hubungan manusia dengan alam yang berupa kodrat alam. Moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri yang berupa takut, jujur, sabar, maut, rindu, keegoisan, bekerja keras, menuntut ilmu, keberanian, kecerdikan, harga diri, sakit, bangga, keraguan dan kecewa.

Penelitian yang dilakukan Prayogi dan Rusminto (2016), dengan judul “Wacana berita bertajuk korupsi pada situs Indonesiana dan implikasi dalam pembelajaran analisis wacana”. Metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatif deskripsi menggunakan analisis wacana Norman Fairclough, dan sampel yang dipakai yaitu berita yang dipublikasi pada laman situs <http://indonesiana.tempo.co>. Kemudian hasil dalam penelitian ini menampilkan unsur-unsur teks yang terdapat dalam wacana yang telah dianalisis, mengemukakan tentang fenomena atau kejadian yang terjadi di masyarakat merupakan praktik *discourse* yang terdiri dari produksi dan konsumsi teks. Selanjutnya, praktik sosiokultural yang merupakan proses produksi wacana dan pemahaman pembaca menjadi modal pembuat wacana dalam menulis juga menjadi hal yang memperkokoh substansi dari wacana. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar dan bahan bacaan, berupa rencana pelaksanaan pembelajaran berguna sebagai skenario pembelajaran yang dapat diimplementasikan di Perguruan Tinggi dan sebagai suplemen penambah pengetahuan terkait wacana kritis.

Penelitian yang dilakukan Miftakhuddin (2019), yang berjudul “Historiografi korupsi di Indonesia: resensi buku korupsi dalam silang sejarah Indonesia” dengan menggunakan metode *historical prespective reasoning* dan menggunakan sampel buku korupsi dalam silang sejarah yang ditulis oleh Carsey. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahan korupsi ialah titik kulminasi dari kompleksitas masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama. Kita akan menyadari pula pemberantasan korupsi di Indonesia bukan masalah sepele, sebab akar korupsi dan percabangannya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Disamping itu, fakta KPK pernah bersinggungan dengan DPR dan POLRI beberapa kali, menunjukkan pelaksanaan tugas korupsi tidak mulus. Dan juga terdapat tiga kelemahan dalam buku. Pertama, terjemahan buku kurang baik sehingga dapat menyulitkan pembaca umum. Kedua, dalam bab II buku ini menyimpang jauh dari topik korupsi. Ketiga, buku ini terkesan seperti buku antologi sehingga tidak menyatu.

Penelitian yang dilakukan Suryawati dan Agustiar (2018), yang berjudul “komisi pemberantasan korupsi dalam konstruksi media *online* (analisis wacana kritis berita putusan sidang praperadilan pertama Setya Novanto di Tribunnews.com periode 30 september 2017)” dengan metode kualitatif dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough, dan sampel yang digunakan yaitu media masa Tribunnews.com terkait wacana KPK dalam berita pasca sidang pra-peradilan putusan yang melibatkan Setya Novanto periode 30 september 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tribunnews.com meletakkan KPK sebagai pihak yang salah dan Setya Novanto yang benar. KPK dikonstruksikan tidak memiliki kompetensi untuk menangani kasus Setya Novanto. Tribunnews.com mengarahkan pandangan khalayak untuk menyudutkan KPK. Pihak Tribunnews.com melawan arus suara publik dalam pemberitaannya tentang

KPK adalah sebagai strategi bisnis. *Positioning* Tribunnews.com ini dilakukan karena nyaris semua media *online* berada untuk membela KPK. Dari sudut pandang bisnis media hal ini tidak menguntungkan untuk mencari iklan.

Dari masalah yang diulas dalam penelitian diatas sudah cukup beragam dengan berbagai pendekatan dan keterkaitan, namun masih adanya keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya yang mana hanya meneliti korupsi dengan terfokus pada objek media masa, media sosial, *news paper*, surat-surat pribadi atas laporan korupsi dan perundang-undangan. Adapun objek penelitian yang menggunakan dokumentasi atau jurnal yang diterbitkan KPK dan *Transparency* Indonesia menggunakan metode kuantitatif dengan terfokus pada dampak ekonomi akibat korupsi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya dengan terfokus pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif, serta terfokus pada artikel –artikel penelitian yang ditulis oleh para peneliti dalam jurnal ekonomi yang berada pada *database* Sinta dengan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh KEMENRISTEKDIKTI sebagai lembaga negara yang mengontrol penelitian-penelitian khususnya penelitian korupsi yang dilakukan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur perhitungan secara statistika. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan kita untuk menguji pengalaman orang-orang secara detil melalui penggunaan seperangkat metode seperti wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi, analisis konten, metode visual, dan biografi atau sejarah hidup. Sehingga desain penelitian seperti itu hanya cocok dilakukan dengan metode kualitatif (Hennink dkk., 2011).

Rancangan Penelitian

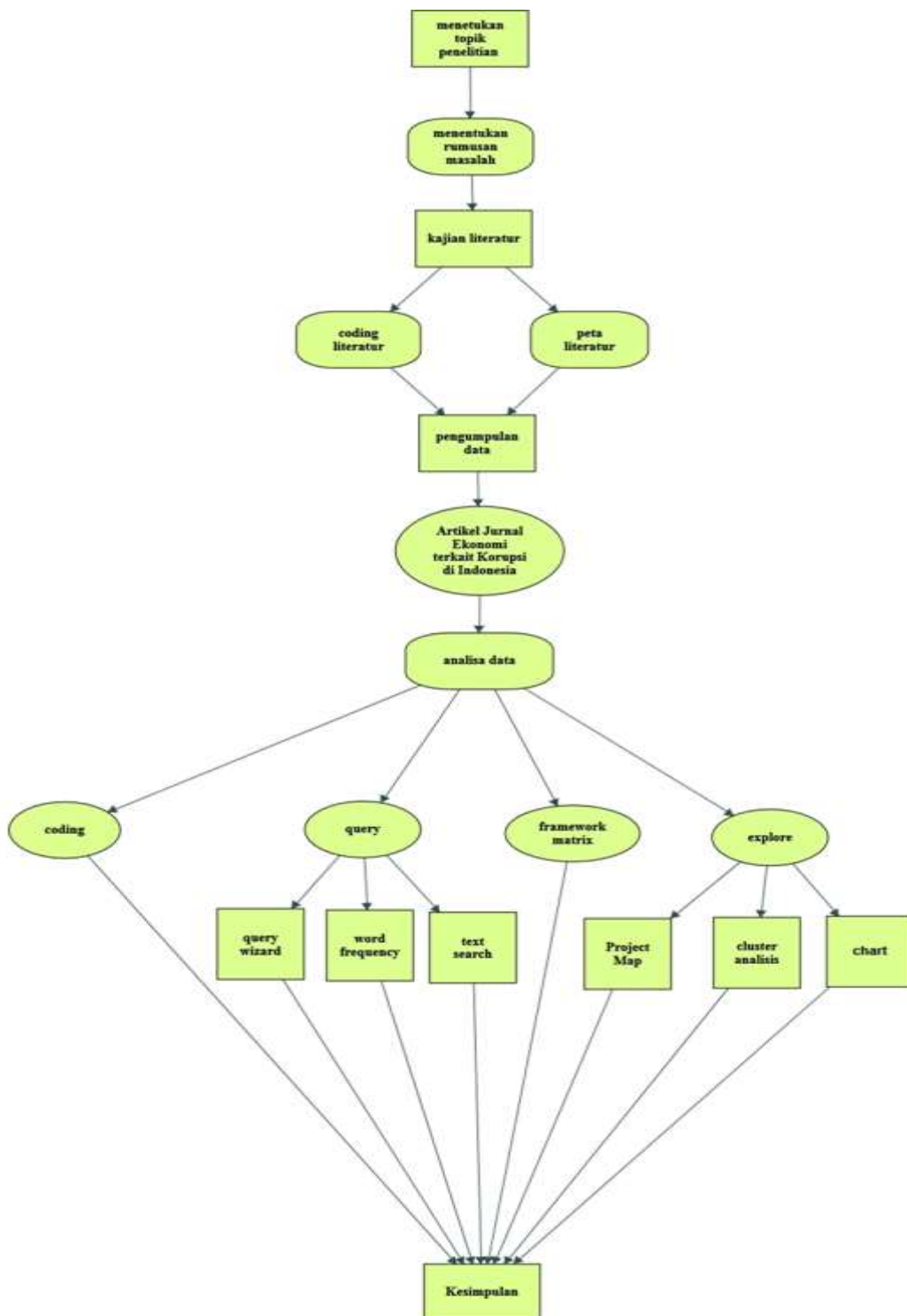
Rancangan penelitian (*research approach*) adalah tahapan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2013). Rancangan penelitian ini sangat mempengaruhi metode penelitian. Hal ini dikarenakan rancangan penelitian merupakan pondasi untuk merencanakan proyek penelitian yang baik. Artinya, apabila penelitian ini dirancang dengan baik maka metode penelitian yang digunakan akan memperoleh hasil penelitian yang baik (Magolda, 2007). Rancangan penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang di mulai dari menentukan topik penelitian, menentukan rumusan masalah, kajian literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Secara ringkas dapat di gambarkan dalam diagram alir sebagaimana tampak pada Gambar 1.

Objek Penelitian

Objek penelitian yang di ambil dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari portal Sinta (*Science and Technology Index*) dimana portal ini merupakan portal yang disediakan pemerintah dalam hal ini KEMENRISTEKDIKTI demi menghimpun jurnal-jurnal yang ditulis para peneliti melalui ide pemikiran dalam bentuk artikel serta data. Jurnal yang dipilih penulis dalam objek penelitian ini merupakan jurnal bidang ekonomi yang meliputi artikel terkait dengan korupsi, dan menggunakan data dari web *Anti Corruption Clearing House* KPK (<https://acch.kpk.go.id/id/>) guna melihat gambaran umum korupsi di Indonesia. Objek ini dipilih penulis karena dalam portal Sinta tiap artikel yang ada telah melalui proses kontrol yang sesuai dengan *international standar serial number* yang diakui dunia melalui lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Kemudian diklasifikasi kembali melalui akreditasi jurnal nasional dan dikelompokan dengan label Sinta 1 hingga Sinta 6 sesuai dengan peringkat jurnal yang telah ditetapkan, serta data dari ACCH KPK dipilih karena KPK sebagai lembaga utama yang ditugaskan khusus melalui Undang-Undang untuk menanggapi korupsi di Indonesia.

Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dalam melakukan penelitian. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Johnston, 2014). Sedangkan menurut Hendriyani dkk. (2017), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Tipe data sekunder yaitu: (a) data internal yang berupa dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di dalam suatu organisasi; (b) data eksternal yaitu berupa dokumen yang umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berada pada website Sinta yang berupa artikel-artikel yang sehubungan dengan korupsi di Indonesia.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri karena yang dapat secara emik dan empatik menangkap seluruh penghayatan si pemilik realitas adalah peneliti sebagai manusia (*the researcher is the instrument*) (Tracy, 2019). Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang begitu penting dan strategi kedudukannya didalam keseluruhan kegiatan penelitian serta kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terhimpun. Pada penelitian kualitatif, penekanan instrumen utama penelitian terdapat pada diri peneliti itu sendiri, maka dalam menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah memerlukan pendekatan melalui perangkat lunak dari komputer dan didukung juga oleh *software* yang mana nantinya sangat membantu peneliti dalam mengerjakan sebuah analisis.

Sumber Data

Menurut (Djam'an dan Aan, 2014), data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang berasal dari halaman website Sinta yang berisikan beberapa jurnal resmi oleh pemerintah serta data dari KPK yang berasal *website* ACCH. Data yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan beberapa kriteria yang mana kriteria tersebut diantaranya:

1. Artikel yang terkait korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 sampai 2019.
2. Hanya artikel yang menggunakan metode kualitatif.
3. Jurnal bidang ekonomi yang berada di portal Sinta (*science and technology index*).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Djam'an dan Aan, 2014). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data pada penelitian ini ialah dengan menggunakan studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dari berbagai literatur yang bisa mendukung penelitian ini. Dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik konten analisis dalam melakukan penelitian. Konten analisis adalah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks (atau materi lainnya) ke konteks penggunaannya (Klaus, 2004). Analisis konten bukan sekedar pengumpulan data melainkan metode utama dalam analisis data. Untuk itu, konten analisis merupakan proses yang teintegrasi dari pengumpulan data hingga analisis data (Leavy, 2014). Demi mendukung analisis, penelitian ini menggunakan *Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS) yaitu Nvivo 11. Software Nvivo merupakan alat analisis data kualitatif yang diciptakan oleh Tom Richards lalu di kembangkan oleh *Qualitative Solutions and Research* (QSR) *Internasional*. QSR adalah perusahaan pertama yang mengembangkan *software* analisis data kualitatif (Bazeley dan Jackson, 2013). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana. Menurut (Miles dkk., 2014), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Peneliti menggunakan *software* Nvivo untuk membantu analisis data. Nvivo merupakan software yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data kualitatif, seperti gambar, diagram, audio, halaman web, dan sumber dokumen lainnya (Bazeley dan Jackson, 2013). Adapun aktivitas teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. Reduksi Data

Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis data adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Berdasarkan pengertian di atas, setelah peneliti melakukan pengumpulan daftar jurnal yang berada pada website Sinta, peneliti mengeliminasi data-data yang tidak sesuai dengan kategori informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perbandingan. Selain itu, peneliti juga mengeliminasi penelitian terdahulu yang tidak dapat mendukung penelitian dengan topik korupsi. Sehingga data-data yang digunakan merupakan data-data yang berhubungan dengan rumusan masalah sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Kemudian data-data yang telah dipilih dikelompokkan berdasarkan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data

Langkah kedua dalam melakukan analisis data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk grafik, *pie-chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data dapat tersusun dalam pola hubungan dan akan semakin mudah dipahami.

Berdasarkan pengertian diatas, setelah peneliti melakukan reduksi dan pengelompokkan data, kemudian peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk *word tree*, *project map*, *analytical maps*, *framework matrices*, *word frequency*, *text search*, *cluster analysis*, *chart* dan narasi. Sehingga dalam penjelasan secara naratif dapat mudah dipahami dan terorganisir secara jelas hubungan antar variabelnya.

3. Text Search Query

Fitur *text search query* dalam Nvivo digunakan untuk menemukan kejadian sebuah kata, ungkapan, atau konsep yang ada dalam sebuah dokumen. Fitur *text search query* digunakan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan kata yang mengarah pada topik atau isu menarik yang ada dalam suatu dokumen atau *nodes*. Dalam penelitian ini, peneliti menjalankan fitur *text search query* untuk melihat penggunaan kata dalam beberapa *sources*.

4. Framework matrices

Framework matrices menyediakan format analisis yang dirancang untuk analisis lintas kasus, dengan kasus di baris dan node tematik dalam kolom.

5. Cluster analysis

merupakan teknik yang bisa digunakan peneliti untuk memvisualisasikan pola *project* dengan mengelompokkan sumber atau node yang berbagai kata kata serupa, nilai atribut yang sama, atau di note bagian yang sama. Ini begitu berguna bagi peneliti melihat pola dalam data dan menyediakan tautan ke topik berguna lainnya.

6. Chart

merupakan fitur yang membantu menyajikan data dengan demografis sumber yang memiliki kecenderungan.

7. Analytical map

merupakan cara peneliti merepresentasikan grafis dari berbagai data dan meringkaskan berbagai item dalam *project* kemudian mengeksplorasi dan menyajikan koneksi dalam data.

Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah menginterpretasi atau memaknai data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan (Creswell, 2013). Terdapat tiga bentuk bentuk interpretasi penarikan kesimpulan yaitu: 1) interpretasi data dapat berupa interpretasi pribadi peneliti dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian; 2) interpretasi data dapat juga berbentuk makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori; dan 3) interpretasi juga dapat berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab yang muncul dari data dan analisis tetapi bukan dari hasil ramalan peneliti. Peneliti akan memanfaatkan hasil olah data oleh Nvivo yang telah disajikan dalam bentuk peta dan query untuk menarik kesimpulan.

Keabsahan Data

Menurut (Leavy, 2014), terdapat empat aspek dalam menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan (*credibility*) merupakan unsur-unsur yang memungkinkan orang lain untuk mengenali pengalaman yang terkandung dalam penelitian melalui interpretasi pengalaman peneliti, memeriksa

keterwakilan data secara keseluruhan, pemeriksaan anggota yang melibatkan etika peneliti untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti adalah representasi akurat dari pengalaman penelitian. Penelitian ini juga menggunakan berbagai dokumen penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian korupsi yang terdapat di Indonesia, guna meningkatkan derajat kepercayaan penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Menurut (Tracy, 2019), triangulasi data mengumpulkan berbagai jenis data yang dilihat melalui berbagai perspektif untuk mencapai kepercayaan. Singkatnya, mengumpulkan data melalui beberapa strategi sampling, menggunakan lebih dari satu penyidik di lapangan, melibatkan beberapa posisi teoritis dalam analisis data, atau menggunakan metode kontras pengumpulan data.

Moleong (2014) menyebutkan bahwa terdapat empat macam triangulasi data yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan triangulasi metode dengan cara melakukan beberapa fitur dalam Nvivo untuk menemukan satu topik unik tertentu dalam jurnal.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Menurut Leavy (2014), keteralihan merupakan kemampuan untuk mentransfer hasil penelitian dari satu kelompok ke kelompok lain atau deskripsi yang digunakan untuk memberikan informasi kontekstual yang terperinci kepada pembaca.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Leavy (2014), kebergantungan dapat tercapai jika peneliti memiliki rekan-rekan yang berpartisipasi dalam proses analisis. Dalam hal ini kebergantungan melibatkan dosen pembimbing dengan cara mengkroscek proses penelitian.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Menurut Leavy (2014), uji kepastian merupakan sikap kritis terhadap diri sendiri pada bagian dari penelitian tentang bagaimana prasangka sendiri dapat mempengaruhi penelitian. Dalam keadaan ini peneliti menjadi pihak yang subjektif, untuk itu perlu melibatkan rekan dalam penelitian agar bisa menjadi objektif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45.
- Adebisi, J., & Gbegi, D. (2015). Fraud and the Nigerian Public Sector Performance: The Need for Forensic Accounting. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 5(5), 67–78.
- Alatas, S. H. (1983). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Anti Corruption Clearing House. (2018). *Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.
- Arif, L. (2015). Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kepolisian Resor Rokan Hilir, 2(1), 1–15.
- Astuti, P. (2014). LSM dan Gerakan Anti Korupsi: Analisis Peran LSM dalam Membangun Kesadaran Anti Korupsi dan Dalam Memerangi Tindakan Pidana Korupsi di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Diponegoro*, 13(2), 51–62.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis with NVivo*. London: Sage Publication Ltd.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. New York: Sage Publications
- Djam'an, S., & Aan, K. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Erlando, A. (2019). Studi Ekonomi Korupsi di Beberapa Kota di Indonesia. *Jurnal EcceS: Economic, Social and Development Studies*, 6(2), 130–151.
- Frolova, I., Antonova, I., Khamitova, L., Zakirova, L., & Chukmarova, L. (2017). Studies the Social Media on Corruption Issues through Content Analysis. *Revista Espacios*, 38(49), 28-39.
- Frey, A. H., & Black, H. C. (1934). Black's Law Dictionary. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 82(8), 886.
- Garner, B. A. (2014). *Black 's Law Dictionary*. Toronto: Thomson Reuters
- Hall, J. (2011). *Accounting Information System (Ed. 4th)*. Jakarta: Salemba. Empat
- Hamdani, R., Kumalahadi, & Urumsah, D. (2017). The Classification of Corruption in Indonesia: A Behavioral Perspective. *SHS Web of Conferences*, 34, 10002.
- Hendriyani, R., Chusna, K., Atmaja, B. T., Itsna, I. M., & Yanty, R. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Retrieved from https://www.academia.edu/36353086/Metodologi_Penelitian_Ekonomi_dan_Bisnis.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, J. (2011). *Qualitative Research Method*. UK: Sage Publications
- Indonesia Corruption Watch. (2000). *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*. Jakarta: ICW
- Johnston, M. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time has Come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)*, 3(3), 619–626.
- Kemenristekdikti. (2018). *Pedoman akreditasi jurnal ilmiah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Klaus, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. California: Sage Publications
- Leavy, P. (2014). *The Oxford Handbook of Qualitative Researcher*. UK: Oxford University Press
- Mackevicius, J., & Giriunas, L. (2013). Transformational Research of the Fraud Triangle. *Ekonomika*, 92(4), 150–163.
- Magolda, P M. (2007). Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers. *Journal of College Student Development*. *Journal of College Student Development*, 48(1), 123-125.
- Miftakhuddin. (2019). Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia. *RIHLAH Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 7(2), 168-172.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook. *Technical Communication Quarterly*, 24, 109-112.
- Moleong L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, H. Y. (2014). To Be Corrupt or Not To Be Corrupt. *Journal of Money Laundering Control*, 17(3), 306–326.
- Prayogi, R., & Rusminto, N. E. (2016). Wacana Berita Bertajuk Korupsi dalam Situs Indonesiana dan Implikasinya pada Pembelajaran Analisis Wacana. *J-Symbol (Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya)*, 3(2), 1-10.
- Prihandini, W. (2013). Pola Kasus Korupsi di Indonesia 2012. *Proceedings International Conference for Emerging Markets*, 1–26.
- Publika. (2019). *Lima Kasus Korupsi Paling Fantastis Di Indonesia*. Retrieved from <https://publika.co.id/2019/02/12/lima-kasus-korupsi-paling-fantastis-di-indonesia/>.
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of Internal Control Procedures: Antecedents and Moderating Effect on Organisational Justice and Employee Fraud. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 104–124.

- Rivaldi, S. A. (2017). Korupsi dalam Konstruksi Media: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Korupsi di Televisi Swasta Nasional TV One dan Kompas Tv. *Thesis*. Universitas Negeri Semarang.
- Sartika, E. (2014). Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul “Kita Versus Korupsi”. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 63–77.
- Sulistyantoro, H. T. (2004). *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*. Kompas.
- Suprayitno, A. (2019). *Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Jurnal Ilmiah Bagi Guru*. Yogyakarta: Deepublish
- Suryawati, I., & Agustiar, M. S. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Konstruksi Media Online (Analisis Wacana Kritis Berita Putusan Sidang Praperadilan Pertama Setya Novanto di Tribunnews.com Periode 30 September 2017). *Jurnal Audience*, 1(2), 107–122.
- Syuraida, H. (2015). Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi. *AVATAR Ejournal Pendidikan Sejarah*, 3(2), 230–238.
- Tokarz, R. E., & Bucy, R. (2019). Global Information Literacy: A Content Analysis of Three Journals. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 68(3), 242-254.
- Tracy, S. J. (2019). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. 2nd Edition. New Jersey: Wiley- Blackwell
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ulya, C., Eko, N., & Mujiyanto, Y. (2016). Metafora dalam Puisi Antikorupsi Karya Penyair Indonesia. *Atavisme*, 19(2), 206–219.
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wolfe, B. D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38-42